

## ABSTRAK

Sumber daya alam hayati baik flora dan fauna yang dimiliki Indonesia sangatlah banyak dimana kelestariannya perlu dijaga melalui upaya meminimalisir perdagangan maupun perburuan satwa langka. Ancaman dan gangguan terhadap hutan tersebut mengancam keberfungsian ekosistem, penjualan satwa langka menyebabkan menurunnya tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Penegakan hukum terhadap penjualan satwa langka di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat 2 mengenai larangan melakukan kejahatan terhadap satwa. Permasalahan yang penulis teliti yaitu mengenai Penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa langka dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya .

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek. Spesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan. Dengan analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dari hasil analisis yang dilakukan tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yang diuraikan dalam bentuk narasi tanpa menggunakan rumus-rumus atau angka statistik untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa langka sudah terlaksana sebagaimana mestinya, para penegak hukum sudah pro aktif dengan melakukan tugasnya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya meskipun unsur-unsur dalam Undang-Undang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sudah tidak sesuai lagi diterapkan terhadap pelaku penjual satwa dengan modus operandi saat ini, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan. Penegak hukum pun dengan terpaksa masih menggunakan Undang-Undang KSDA untuk menjerat para pelaku serta belum adanya kejelasan kewenangan antar lembaga yang dipicu dengan sifat kurang peduli dari masyarakat yang memandang bahwa penegakan hukum merupakan tugas seorang polisi saja dan kebudayaan masyarakat yang masih tidak sadar hukum.

## ABSTRACT

*Biological natural resources such as flora and fauna that exist in Indonesia has the most various species and it's important to save its sustainability by minimizing the trade and the hunting of the rare animals. The threat and disturbance made towards the forest endangers the function of the ecosystem, and the trading of the rare animals decreases the biological various species in Indonesia. Law enforcement on trading rare animals is regulated in Act number 5 in 1990 about biological natural resources and their ecosystem and in Article 21 paragraph 2 about the prohibition on harming animals. The issue that the author studies in this research is about the law enforcement on perpetrators of selling endangered species based on act number 5 in 1990 about biological natural resources and their ecosystem.*

*The method used in this research is the juridical normative approach which is used to retrace that the focused issue is about the connection between one regulation with another regulation and how it relates to its practice. The specification of this research is descriptive analysis which is a method that is used to describe valid regulations and to correlate them with the theories of law and with the law enforcement practices on the issue. To analyze the data in this research, the author used the qualitative analysis method, which refers to the legals norm that can be found in the regulations and the court judgment, as well as the norms that evolve in the society. A deductive conclusion is then drawn out from the result of the analysis which is described in a narrative explanation without using a formula or statistics which afterwards is made into a specific conclusion.*

*The result of this research shows a conclusion that the law enforcement on the subject that sold endangered animals has already been applied. The law enforcers were pro-active in getting their jobs done due to their authorities and responsibilities although the regulation on the biological natural resources and their ecosystem was no more suitable to be used on the subject with the current situation, therefore they had to face a lot of obstacles. The law enforcers had to use the regulation of biological natural resources conservation to arrest the subjects, also the authorities of the institutions weren't clear which was caused by the society's ignorance because they assume that law enforcement is the police's duty and because of the society's unawareness of law.*